

Analisis Implementasi Probity Audit dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix/ Beton)

(Ruas Kading Watanglempo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo)

Samsu Rijal^{1*}, Sofyan Bachmid², Sudarman Supardi³

1*) Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, samsurijalnawir@gmail.com

2) Teknik Sipil, Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar

3) Teknik Sipil, Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar

Abstract

The government's effort to overcome various frauds and irregularities in the process of procurement of goods and services is to apply a real-time procurement audit approach called a probity audit. The number of cases of procurement of goods/services that occurred in Wajo Regency even though the government has implemented a probity audit and there is still a lack of research related to probity audits so that the authors are interested in examining the implementation of probity audits in more depth. The purpose of this study is to analyze the most dominant constraints on the implementation of the Probity Audit in the Procurement of Goods/Services. The analytical method used is statistical analysis in the form of validity and reliability tests, then determine the ranking of the questionnaires by calculating the value of the Relative Interest Index (RII). The results showed that the most dominant factor in the implementation of the probity audit in the Procurement of Goods/Services carried out by the Inspectorate of Wajo Regency related to the road improvement work package (hotmix/concrete) Section of Kading Watang Lempong, Bola District, Wajo Regency in sequence are material constraints, human resource constraints, method constraints, cost constraints, and equipment constraints.

Keywords: Probity Audit, Road Pavement Improvement, Wajo Regency,

Abstrak

Upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menerapkan pendekatan audit pengadaan barang dan jasa secara real-time yang disebut probity audit. Banyaknya kasus pengadaan barang/jasa yang terjadi di Kabupaten Wajo walaupun pemerintah sudah menerapkan probity audit dan masih kurangnya penelitian terkait probity audit sehingga penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan probity audit secara lebih mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala paling dominan pada Pelaksanaan Probity Audit dalam Pengadaan Barang/Jasa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik berupa uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian menentukan ranking dari kuisioner dengan menghitung nilai Indeks Kepentingan Relatif (IKR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan pada pelaksanaan probity audit dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wajo terkait kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan (hotmix/beton) Ruas Kading Watang Lempong Kec. Bola Kabupaten Wajo secara berurutan adalah kendala material, kendala sumber daya manusia, kendala metode, kendala biaya, dan kendala peralatan.

Kata Kunci: Probity Audit, Peningkatan Perkerasan Jalan, Kabupaten Wajo.

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan sebuah organisasi pemerintah dapat diukur dengan melihat perspektif pengelolaan keuangannya, yang mana pengelolaan keuangan daerah yang tepat dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketetapan suatu kegiatan sehingga pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya.

Pemerintah telah melakukan berbagai hal untuk mencegah korupsi di bidang pengadaan, diantaranya membuat struktur organisasi pengadaan dan mendesain pengadaan berbasis elektronik (Wibowo, 2015). Selain itu, upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menerapkan pendekatan audit pengadaan barang dan jasa secara real-time yang disebut probity audit. Chew dan Ryan (2002) mengemukakan bahwa pelaksanaan Probity Audit dapat meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah.

Probity Audit diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-362 /K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Probity Audit utamanya di lakukan terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis (melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pelayanan dasar masyarakat, dan terkait dengan isu politis). Teknik probity audit yang lebih di utamakan adalah peninjauan fisik, observasi, diskusi, dan wawancara tanpa mengesampingkan teknik-teknik audit yang lainnya (BPKP, 2012). Dampak yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip-prinsip probity diantaranya menghindari konflik dan permasalahan, menghindari praktek korupsi, memberikan keyakinan secara objektif dan independen atas kejujuran (probity) proses pengadaan barang/jasa, serta meminimalkan potensi adanya litigasi atau permasalahan hukum (BPKP, 2012).

Berdasarkan kajian yang dilakukan KPK (2015) terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah ditemukan bahwa audit yang dilakukan oleh APIP selama ini belumlah maksimal dalam menjamin efektifitas pengadaan barang/jasa, karena APIP cenderung melakukan post audit (audit setelah pembayaran) sehingga berpotensi terjadinya masalah berupa penyimpangan dan kasus tindak pidana baru dapat diketahui setelah adanya audit oleh eksternal atau proses penegakan hukum, oleh karena itu APIP perlu melakukan audit saat pra, proses dan pasca kegiatan pengadaan barang/jasa. Kajian KPK tersebut di atas juga disebutkan bahwa studi benchmark terhadap negara-negara yang tingkat korupsinya kecil (IPK > 6,0) melakukan pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara probity audit (Australia dan negara-negara persemakmuran) dan pre-award audit (Amerika Serikat dan negara-negara yang dipengaruhi). Dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia sudah sangat tertinggal dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa.

Penelitian tentang pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah banyak dilakukan, Dengan banyaknya kasus pengadaan barang/jasa yang terjadi di kabupaten Wajo walaupun pemerintah sudah menerapkan probity audit dan masih kurangnya penelitian terkait probity audit sehingga penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan probity audit secara lebih mendalam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala paling dominan pada Pelaksanaan Probity Audit dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wajo terkait kegiatan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (hotmix/beton) Ruas Kading Watang Lempong Kec. Bola Kabupaten Wajo.

2. METODE

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data menurut Singaribun, 1995 (dalam Suyatno, 2010). Ada tiga persyaratan penting dalam mengadakan kegiatan penelitian yaitu:

- 1) Sistematis, apabila penelitian dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien.

- 2) Berencana, apabila penelitian dengan adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya.
- 3) Mengikuti konsep ilmiah, apabila mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan.

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari cara-cara penelitian untuk menemukan, mengumpulkan, mengembangkan, menganalisis dan menguji kebenarannya, dikerjakan dengan hati-hati, sistematis dan berdasarkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, yaitu langsung berhubungan dengan responden dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang berupa kuisioner yang disusun oleh peneliti.

B. Populasi dan Sampel

Peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen (Moeleong, 2014).

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto (2019) menjelaskan bahwa “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Sedangkan menurut Sugiyono (2016) populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Maka dari penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo yaitu penanggungjawab, supervisor, pengendali teknis, tim probity audit Inspektorat, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Dinas PUPRP Kabupaten Wajo.

Penarikan atau pembuatan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Arikunto (2010), mengatakan bahwa “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Selanjutnya menurut Sugiyono (2016) sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Mengenai hal ini, Arikunto (2019) menjelaskan bahwa “purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu”. Begitu pula menurut Sugiyono (2015), sampling purposive adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Tujuan dan pertimbangan pengambilan subjek/sampel peneliti ini adalah sampel tersebut merupakan pakar ahli yang berpengaruh. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 45 responden yang terdiri dari penanggungjawab, supervisor, pengendali teknis, tim probity audit Inspektorat, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Dinas PUPRP Kabupaten Wajo.

C. Kebutuhan Data

Dalam penelitian ini dianalisa faktor - faktor yang berpengaruh yang sering terjadi dari saat proses pekerjaan berlangsung. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui faktor kendala yang mempengaruhi probity audit pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo.

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data – data penting yang kita perlukan untuk menunjang atau mendukung penelitian. Untuk dapat mendukung penulisan dan sebagai keperluan analisa data, maka dari itu diperlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam maupun dari luar penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- 1) Data Primer ; Data-data yang dikumpulkan dari studi kasus pengamatan lapangan secara langsung berhubungan dengan responden, tanpa melalui perantara atau pihak lain, misalnya dari suatu badan statistik atau data referensi lainnya, dan untuk mendapatkan data yang diinginkan media yang digunakan adalah kuesioner.
- 2) Data Sekunder; Data-data pendukung yang dapat dijadikan masukan oleh penulis dan referensi dalam melakukan analisis data penelitian ini. Data sekunder, diantaranya data yang diperoleh dari buku referensi dan jurnal.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, dipakai kuesioner sebagai alat untuk melakukan survei. Kuesioner ini dibagi menjadi dua bagian utama, yakni:

- 1) Uji Validitas dan Uji Reliabilitas; Validitas adalah skala dimana kesimpulan yang dibuat dengan berdasarkan skor menurut angka menjadi sesuai. Pengujian validitas ini menggunakan *Total Correlation (Corrected Item)*, analisis ini dengan cara mengkolerasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Sementara pengujian reliabilitas menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* dengan nilai sebesar 0,06. Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel $\geq 0,6$ maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan, dan sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,6$ maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel.
- 2) Bagian B

Berisi tentang faktor – faktor kendala yang memengaruhi pelaksanaan *probit audit* pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo dengan skala 1 sampai 4. Untuk penilaian sebagai berikut:

- = Tidak Berpengaruh (TB)
- = Kurang Berpengaruh (KB)
- = Berpengaruh (B)
- = Sangat Berpengaruh (SB)

Menganalisa data untuk menentukan rangking dari kuisisioner dengan menghitung nilai Indeks Kepentingan Relatif (IKR). Untuk mendapatkan nilai Indeks Kepentingan Relatif (IKR) digunakan rumus pada persamaan 1 berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1)$$

Di mana:

- $\bar{x}$ = Rata – rata ukuran nilai faktor.
- x_i = Ukuran nilai faktor pada responden ke – 1
- n = Jumlah responden

Variabel yang memiliki nilai IKR tertinggi diberi rangking 1 (satu), demikian seterusnya sampai nilai IKR terendah secara berurutan. Apabila terdapat dua atau lebih dari nilai IKR yang sama, Maka penentuan rangkingnya dengan cara

menjumlahkan rangking – rangking yang akan mewakilinya, kemudian dibagi dengan banyaknya variabel yang memiliki nilai sama. Metode analisis ini akan sangat berguna untuk mengidentifikasi rangking responden dan memberi prioritas terhadap variabel yang diteliti.

Setelah nilai mean dan rangking diketahui, kemudian menentukan range untuk mengelompokan masing – masing variabel. Dengan memberi 4 (empat) pilihan yang sesuai dengan tingkat kepentingan dan untuk kepentingan di lapangan.

Cara menyimpulkan data adalah dengan menarik kesimpulan berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, yaitu dengan:

Menentukan interval yang kurang setuju sampe yang sangat setuju dengan kriteria skor hasil analisa sebagai berikut:

- Skor $3,25 < \bar{x} \leq 4,00$ merupakan faktor yang sangat berpengaruh.
- Skor $2,50 < \bar{x} \leq 3,25$ merupakan faktor yang berpengaruh.
- Skor $1,75 < \bar{x} \leq 2,50$ merupakan faktor yang kurang berpengaruh.
- Skor $1,00 \leq \bar{x} \leq 1,75$ merupakan faktor yang tidak berpengaruh.

Berdasarkan urutan rangking skor nantinya diambil 4 faktor yang berpengaruh di antara faktor faktor lain, yaitu dengan melihat rangking nilai teratas dari nilai faktor yang keluar di dalam analisa tersebut.

3. PEMBAHASAN

A. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian validitas menunjukkan ketelitian serta ketepatan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui validitas pertanyaan dari setiap variabel, maka rhitung dibandingkan dengan r-tabel. r-tabel dapat dihitung dengan $df = N - 2$. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 45 orang, sehingga $df = 45 - 2 = 43$, $r_{(43)} = 0,248$. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 1 Uji Validitas

Variabel	Item	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Keterangan
Kendala SDM	SDM1	$0,662 > 0,248$	Valid
	SDM2	$0,677 > 0,248$	Valid
	SDM3	$0,491 > 0,248$	Valid
	SDM4	$0,354 > 0,248$	Valid
Kendala Biaya	Bia1	$0,980 > 0,248$	Valid
	Bia2	$0,979 > 0,248$	Valid
Kendala Metode	Met1	$0,731 > 0,248$	Valid
	Met2	$0,410 > 0,248$	Valid
	Met3	$0,889 > 0,248$	Valid
	Met4	$0,850 > 0,248$	Valid
	Met5	$0,781 > 0,248$	Valid
Kendala Material	Mat1	$0,635 > 0,248$	Valid
	Mat2	$0,571 > 0,248$	Valid
	Mat3	$0,390 > 0,248$	Valid
	Mat4	$0,455 > 0,248$	Valid
Kendala Peralatan	Per1	$0,980 > 0,248$	Valid
	Per2	$0,979 > 0,248$	Valid

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Corrected Item – Total* >0,248.

Pengujian reliabilitas menunjukkan seberapa besar suatu instrument tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas instrumen yang semakin tinggi, menunjukkan hasil ukur yang didapatkan semakin terpercaya (*reliabel*). Penentuan reabilitas instrumen suatu penelitian adalah:

- Jika *cronbach's alpha* <0,6 maka reabiliti dikatakan buruk;
- Jika *cronbach's alpha* 0,6 – 0,8 maka reabiliti dikatakan cukup; dan
- Jika *cronbach's alpha* >0,8 maka reabiliti dikatakan baik.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas atas variable – variabel faktor kendala.

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kendala SDM	0,641	Cukup
Kendala Biaya	0,957	Baik
Kendala Metode	0,796	Cukup
Kendala Material	0,606	Cukup
Kendala Peralatan	0,957	Baik

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sehingga berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, menunjukkan bahwa instrument memiliki tingkat reliabilitas yang cukup dan baik, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien *alpha*>0,60, jadi hasil ukur yang akan didapatkan dapat dipercaya.

B. Analisis Kendala yang Mempengaruhi Implementasi *Probity Audit* Dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix/Beton) Ruas Kading Watang Lempong Kec. Bola Kab. Wajo.

Analisis kendala dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi mengenai kendala-kendala tersebut berdasarkan studi literatur yang terdapat dalam buku, artikel ilmiah, serta wawancara terhadap pihak-pihak yang pernah terlibat dalam pelaksanaan *probity audit* dalam proses pengadaan barang/jasa. Berikut akan disajikan hasil analisis faktor yang berpengaruh pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa pada Proses Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix/Beton) Ruas Kading Watang Lempong Kec. Bola Kab. Wajo (Tabel 3)

Tabel 3 Kendala - Kendala Yang Mempengaruhi Pelaksanaan *probity audit* dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix/Beton) Ruas Kading Watang Lempong Kec. Bola Kab. Wajo

Kendala		Mean	Rank	Ket
Kendala Sumber Daya Manusia				
1.	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan <i>Probity Audit</i>	2,69	3	Berpengaruh
2.	Kurangnya jumlah <i>Auditor Probity</i> yang memiliki Kompetensi dan Pengalaman	2,67	4	Berpengaruh
3.	Kurangnya Waktu yang diberikan dalam Pelaksanaan <i>Probity Audit</i>	3,36	1	Sangat berpengaruh

Kendala		Mean	Rank	Ket
4.	Tindak lanjut temuan <i>Probit Audit</i> belum dilaksanakan	3,22	2	Berpengaruh
Kendala Biaya				
1.	Keterbatasan anggaran pada pelaksanaan <i>probit audit</i>	2,67	2	Berpengaruh
2.	Ketersediaan biaya operasional mempengaruhi pelaksanaan <i>probit audit</i> .	2,71	1	Berpengaruh
Kendala Metode				
1.	Rancangan kontrak tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pepres dan Petunjuk Teknis	2,67	5	Berpengaruh
2.	Pelaksanaan <i>probit audit</i> belum maksimal	2,76	4	Berpengaruh
3.	Belum diterapkan standart atau pedoman yang sama terhadap pelaksanaan <i>probit audit</i> .	2,82	3	Berpengaruh
4.	<i>Probit audit</i> tidak dilakukan dengan semua tahapan yang ada	2,89	1	Berpengaruh
5.	Auditee belum membuat studi kelayakan dan tidak disiplin	2,87	2	Berpengaruh
Faktor Material				
1.	Penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan	2,84	3	Berpengaruh
2.	Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	2,71	4	Berpengaruh
3.	Laporan <i>probit audit</i> tidak diserahkan saat hari terakhir pemeriksaan, tetapi baru dibuat setelah masa pemeriksaan berakhir	3,36	1	Sangat Berpengaruh
4.	Membuat kebijakan internal terkait SOP <i>probit audit</i> yang didalamnya memuat jangka waktu penyusunan laporan dan memberikan sanksi kepada Tim yang tidak selesai tepat waktu.	3,22	2	Berpengaruh
Faktor Kendala Peralatan				
1.	Ketersediaan peralatan penunjang mempengaruhi pelaksanaan <i>probit audit</i> .	2,67	2	Berpengaruh
2.	Keberadaan peralatan mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan <i>probit audit</i> .	2,71	1	Berpengaruh

Dari hasil rangking di atas diambil ranking tertinggi dan terendah di setiap faktor kendala dan indikator sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.

a) Faktor Kendala Sumber Daya Manusia

Pada faktor kendala SDM, indikator “kurangnya waktu yang diberikan dalam pelaksanaan *probit audit*,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 3,36 dan termasuk antara $3,25 < X < 4,00$ yang berarti indikator tersebut sangat berpengaruh. Pada faktor kendala SDM, indikator “tindak lanjut temuan *probit audit* belum dilaksanakan,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 3,22 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh.

Pada faktor kendala SDM, indikator “kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan *probit audit*,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,69 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh. Pada faktor kendala SDM, indikator “kurangnya jumlah *auditor probit* yang memiliki kompetensi dan pengalaman,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,67 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh.

Dalam bahasan tentang faktor kendala SDM yang mempengaruhi pelaksanaan *probit audit* dalam proses pengadaan barang/jasa terdapat 4 indikator di mana semua indikator memiliki nilai mean $> 2,50$ yang artinya semua indikator tersebut sangat penting untuk

diperhatikan dalam pelaksanaan *probity audit* dalam proses pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo.

b) Faktor Kendala Biaya

Pada faktor kendala biaya, indikator “ketersediaan biaya operasional mempengaruhi pelaksanaan *probity audit*,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,71 dan termasuk antara $2,50 < \bar{x} \leq 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh. Pada faktor kendala biaya, indikator “keterbatasan anggaran pada pelaksanaan *probity audit*,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,67 dan termasuk antara $2,50 < \bar{x} \leq 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh.

Dalam bahasan tentang faktor kendala biaya yang mempengaruhi pelaksanaan *probity audit* dalam proses pengadaan barang/jasa terdapat 2 indikator di mana semua indikator memiliki nilai mean $> 2,50$ yang artinya semua indikator tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan *probity audit* dalam proses pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo.

c) Faktor Kendala Metode

Pada faktor kendala metode, indikator “*probity audit* tidak dilakukan dengan semua tahapan yang ada,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,89 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh. Pada faktor kendala metode, indikator “auditee belum membuat studi kelayakan dan tidak disiplin,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,87 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh.

Pada faktor kendala metode, indikator “belum diterapkan standar atau pedoman yang sama terhadap pelaksanaan *probity audit*,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,82 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh. Pada faktor kendala metode, indikator “pelaksanaan *probity audit* belum maksimal,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,76 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh.

Pada faktor kendala metode, indikator “rancangan kontrak tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pepres dan Petunjuk Teknis,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,67 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh.

Dalam bahasan tentang faktor kendala metode yang mempengaruhi pelaksanaan *probity audit* dalam proses pengadaan barang/jasa terdapat 5 indikator di mana semua indikator memiliki nilai mean $> 2,50$ yang artinya semua indikator tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan *probity audit* dalam proses pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo.

d) Faktor Material

Pada faktor kendala material, indikator “laporan *probity audit* tidak diserahkan saat hari terakhir pemeriksaan, tetapi baru dibuat setelah masa pemeriksaan berakhir,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 3,36 dan termasuk antara $3,25 < X < 4,00$ yang berarti indikator tersebut sangat berpengaruh. Pada faktor kendala material, indikator “membuat kebijakan internal terkait SOP *probity audit* yang didalamnya memuat jangka waktu penyusunan laporan dan memberikan sanksi kepada Tim yang tidak selesai tepat waktu,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 3,22 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh.

Pada faktor kendala material, indikator “penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan,” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,84 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh. Pada faktor kendala material, indikator “dokumen

pengadaan tidak sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP),” memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,71 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh.

Dalam bahasan tentang faktor material yang mempengaruhi pelaksanaan *Probity Audit pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo* terdapat 4 indikator yang semuanya memiliki nilai mean lebih dari 2,50 artinya indikator tersebut sangat penting diterapkan dalam pelaksanaan *Probity Audit pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo*.

e) Faktor Kendala Peralatan

Pada faktor penerima manfaat, indikator kesesuaian sasaran masyarakat memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,84 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh. Pada faktor penerima manfaat, indikator respon penerima manfaat memiliki nilai rata – rata (*mean*) 2,71 dan termasuk antara $2,50 < X < 3,25$ yang berarti indikator tersebut berpengaruh.

Dalam bahasan tentang faktor peralatan yang mempengaruhi pelaksanaan *Probity Audit pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo* terdapat 2 indikator yang semuanya memiliki nilai mean lebih dari 2,50 artinya indikator tersebut sangat penting diterapkan dalam pelaksanaan *Probity Audit pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo*.

C. Kendala Dominan dan Faktor Lainnya yang Mempengaruhi Pelaksanaan *Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo*

Dari hasil pertanyaan faktor kendala yang telah dianalisis maka didapat ranking faktor tertinggi hingga terendah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *probity audit* dalam proses pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo.

Tabel 4 Ranking Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan *Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo*

No.	Kendala	Mean	Rank
1.	Kendala Material	3,03	1
2.	Kendala Sumber Daya Manusia	2,98	2
3.	Kendala Metode	2,80	3
4.	Kendala Biaya	2,69	4
5.	Kendala Peralatan	2,69	5

Dari hasil pertanyaan faktor kendala yang diujikan didapat ranking faktor tertinggi hingga terendah, walaupun tidak terjadi perbedaan nilai yang terlalu besar namun dapat dilihat faktor kendala material menjadi yang tertinggi dengan skor 3,06 dan faktor kendala biaya dan peralatan menjadi yang terendah dengan skor 2,67. Dengan demikian maka faktor kendala material merupakan faktor yang paling berpengaruh dominan terhadap pelaksanaan *probity audit* dalam proses pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian dengan meminta pendapat responden penelitian juga diketahui faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Tabel 5 Faktor Lain yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelaksanaan *Probity Audit* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo

No.	Faktor Lainnya	Jumlah	Persentase
1.	Regulasi	30	66,7%
2.	Tidak ada/Tidak menjawab	15	33,3%
	Total	45	100,0%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden penelitian yang terdiri dari Dinas PUPRP Kab. Wajo, Tim Audit Inspektorat, Penanggungjawab, Pengendali Teknis, Supervisor dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), mengemukakan bahwa faktor kendala lain di luar faktor kendala SDM, biaya, metode, material dan peralatan adalah faktor kendala regulasi yakni sebanyak 30 orang (67,3%). Sisanya 15 orang responden (33,3%) tidak memberikan jawaban terkait dengan faktor lain.

4. PENUTUP

Dari pembahasan dan analisis pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa faktor yang paling dominan pada pelaksanaan probity audit dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wajo terkait kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan (hotmix/beton) Ruas Kading Watang Lempong Kec. Bola Kabupaten Wajo secara berurutan adalah kendala material, kendala sumber daya manusia, kendala metode, kendala biaya, dan kendala peralatan

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, dkk. 2022. Kajian Kepribadian Tenaga Kerja terhadap Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Proyek Rehabilitasi Jalan (Studi Kasus : Ruas Makassar - Malino, Provinsi Sulawesi Selatan). Jurnal Konstruksi : Teknik, Infrastruktur dan Sains, Volume 1 Nomor 1 Halaman 22-32. Program Pascasarjana UMI Makassar.
- BPKP. 2012. Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Bagi APIP. Jakarta:BPKP.
- Budiman, Hadi, Yusnaini dan Rela Sari. 2017. "Pengaruh Due Professional Care dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit". Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol.11, No.2, 139-150.
- Buya, Mingkat, dkk. 2022. Analisis Faktor Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Konstruksi Pada Pembagunan Kantor Bupati Pulau Taliabu Dengan Metode Analytic Hierarchy Process. Jurnal Konstruksi : Teknik, Infrastruktur dan Sains, Volume 1 Nomor 1 Halaman 44-53. Program Pascasarjana UMI Makassar.
- Cresswell, J.W. 2010. Research Design. Sage Publications. California.
- Dewi Lutfiah Guhung dan Johan Arifin. Evaluasi Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kota Tangerang Selatan). Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- Diawati, M., dan Nurhayati, R. 2017. Analisis Penerapan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman). Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Ervianto, 2004. Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi, Andi. Yogyakarta.
- Fatmawati, N.I. 2017. Kasus Heli AW 101 Panglima TNI Sebut Ada Penggelapan dan Pemalsuan. www.detik.com. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2018. Jam 21.00
- Firnawaty, Fira, dkk. 2021. Penentuan Pemenang Kontrak Kontruksi dengan Metode Penugasan (Assignment Model) pada Proyek Konstruksi Jalan. Jurnal Flyover, Volume 1 Nomor 2 Halaman 28-37. Program Pascasarjana UMI Makassar.
- Government of South Australia. 2017. Probity and Ethical Procurement Guideline. Diakses pada www.spb.sa.gov.au.

- Hadi, Abd Karim, dkk. 2022. Manfaat Program Padat Karya Revitalisasi Drainase di Waktu Covid-19. *Jurnal Flyover*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 39-47. Program Pascasarjana UMI Makassar.
- Haikal, F. M. (2017). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Fraud. Universitas Lampung.
- Haltenhoff, C. E. (1999). *The CM Contracting System*, Prentice Hall, New Jersey.
- Hamid, M. Afandhy, dkk. 2021. Manajemen Resiko Terhadap Aspek Legal Dan Bisnis Dalam Pekerjaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Di Jalan Tol. *Jurnal Flyover*, Volume 1 Nomor 1 Halaman 12-20. Program Pascasarjana UMI Makassar.
- Hardiyanti, Siti, dkk. 2022. Perbandingan Fast Tracking dengan Least Cost Analysis pada Proyek Peningkatan Jalan Ruas Beroanging – Bungung-Bungung Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Flyover*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 56-65. Program Pascasarjana UMI Makassar.
- Ismael, Idzurnida. 2013. Keterlambatan Proyek Konstruksi Gedung Faktor Penyebab dan Tindakan Pencegahannya. *Jurnal Momentum* Vol.14 No.1.
- KPK. 2015. Laporan Hasil Kajian Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. KPK.
- KPK. 2017. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara. www.acch.kpk.go.id. Diunduh pada tanggal 20 Februari 2017
- Latada, Helmi, dkk. 2022. Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Flyover*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 10-20. Program Pascasarjana UMI Makassar.
- Mahfuroh, R. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Probit Audit Dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa (Kasus di Inspektorat Kabupaten Rembang). Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo.(2005). *Akuntansi Sektor Publik* , Yogyakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. 2015. Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. Indonesia.
- Planning and Controlling Construction Projects: The Best Laid Plans...., The Chartered Institute of Building, UK.
- Pratiwi, Emma, dkk. 2022. Kajian Kinerja Sistem Kontrak Konstruksi Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan Sulawesi. *Jurnal Flyover*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 29-38. Program Pascasarjana UMI Makassar.
- Primahadi, H., dan Utami, N.A. 2017. Analisis Penerapan Probit Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Auditor*. Vol X No.19.Hal. 2
- Primahadi, H., Yudhanti, W. S. 2015. Analisis Perbedaan Tingkat Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Instansi Yang Menerapkan Dan Tidak Menerapkan Probit Audit. *Jurnal Auditor*. Vol VIII No.16. Hal.23
- Project Management Institute (2008), *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Fourth Edition*, Project Management Institute, Pennsylvania.
- Pujiono., I Ketut Jati. Pengaruh Audit Sektor Publik Terhadap Pengembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
- Santoso, Singgih & Fandy Tjiptono. 2004. Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Setiawan, Herdi dan Tri Sukirno Putro. 2013. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 4, No. 2, Oktober 2013, Hal.119-218. Universitas Riau. Riau.
- Siswadi, E. 2012. Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Efektif dan Prima. Bandung: Mutiara Press. Cetakan Pertama
- Soamole, A.M, dkk. 2022. Analisis Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 pada PT. Semen Tonasa. *Jurnal Flyover*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 1-9. Program Pascasarjana UMI Makassar.
- Soeharto, Iman. 1999. "Manajemen Proyek". Edisi kedua. Jakarta : Erlangga.
- Soelendro, Ari. 2000. Paradigma Baru Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta.
- Suparta, dkk. 2021. Studi Komponen Struktur Pembangunan Jalan Tol dengan Metode Sewa Lahan (Studi Kasus Proyek Jalan Tol Semarang-Solo). *Jurnal Flyover*, Volume 1 Nomor 1 Halaman 59-69. Program Pascasarjana UMI Makassar.
- Susilawati dan Maya R Atmawinata.. 2014. Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat. Vol 13. No.2. Hal. 190-201
- Syukron, A. M. (2017). Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengawasan Proses Pengadaan Barang/Jasa. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Yahya, Marzuki dan Endah Fitri Susanti. (2012). "Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". Jakarta: Laskar Aksara.